

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

China merupakan sebuah negara besar yang sudah berdiri lama dengan sejarah panjang ekonomi negaranya dimulai dari masa kekaisaran dinasti Shang (1750-1045 SM) hingga memasuki masa republik China. Perekonomian China dengan rentan waktu yang sangat panjang, juga terus mengalami perubahan-perubahan seiring dengan situasi ekonomi pada masanya. Alexander Eckstein (1977, hal. 1-4, 10-12) menjelaskan dinamika perekonomian di China bukanlah hal yang sederhana untuk dijabarkan, mengingat unsur-unsur yang mempengaruhi kondisinya selalu bergantung pada prospek eksplorasi seseorang apakah mengarah pada elemen yang mendorong perkembangan ekonomi China ataukah sebaliknya berdasarkan dari penilaian perspektif waktu di mana China pernah mengalami warisan ekonomi cemerlang, ekonomi stagnan terbelakang (*economic backwardness*), hingga memasuki masa revolusi ekonomi China pada abad ke-20. Kenneth Pletcher (2011, p. 21) dalam bukunya *The History of China* menyebutkan terlepas dari gejolak politik dan sosial yang terjadi, tidak dipungkiri China merupakan salah satu dari sedikit negara yang dapat berkembang dalam bidang ekonomi dan budaya pada tahap awal peradaban dunia.

Perekonomian China yang dapat bertahan tersebut tentunya tidak terlepas dari usaha bangsa China berkeliling dunia untuk berdagang melalui jalur sutra kuno (*Ancient silk road route*). Dalam sejarah

jalur sutra kuno, Xinru Liu (2010, pp. 1-4) menjelaskan kegiatan berdagang bangsa China dimulai dari kesadaran penduduk lokal pada kisaran waktu 600 SM untuk mendapat pengetahuan baru yang berasal dari daerah lain dalam bercocok tanam, berternak, dan juga mengolah sumber alam lainnya. Kegiatan mencari ilmu itupun secara bertahap berkembang menjadi sarana bertukar barang (barter) dan dagang hingga berlanjut ke daratan mongol dan terus meluas ke arah barat.

Kesuksesan petualangan perekonomian China di masa lalu tampaknya tidak mengantarkan China menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Revolusi ekonomi di China pada tahun 1970an yang mereformasi dan membangkitkan kembali perekonomian negaranya juga hanya mengantarkan ke posisi yang tidak melampaui kekuatan Amerika Serikat (AS) untuk menduduki peringkat pertama dalam mendapatkan keuntungan dari segala arah. Berkali-kali China berusaha namun tidak pernah berhasil untuk merebut posisi adidaya tersebut dikarenakan sesuai dengan penjelasan yufan Hao (1989, p. 177) dari mula pembentukan *People's Republic of China* (RRC) pada tahun 1950-an, China sudah menganggap Amerika Serikat sebagai ancaman keamanan terbesar.

Peneliti senior studi Asia, Lisa Curtis (2008) menjelaskan sebagai upaya untuk mengungguli AS, China pernah berusaha untuk menjalin kerja sama perdagangan dan investasi dengan India di tahun 1999 dimana kerja sama tersebut diharapkan mampu menyulitkan kerjasama Amerika Serikat dengan India. Hanya saja setelah berlangsung dengan sukses selama sekitar tujuh tahun, Pemerintah India menyadari bahwa perkembangan teknologi dan informasi, keuangan, manufaktur, dan juga transportasi hanya berkembang pesat di China. Hal ini kemudian menjadi

bumerang bagi China dengan adanya kecurigaan India mengenai tujuan dan kepentingan China dalam kerjasama tersebut. Disusul dengan konflik perbatasan wilayah utara Kashmir antara India-China sebagai penanda retaknya hubungan di antara keduanya, juga menguatnya hubungan AS dan India yang menjadikan gagalnya tujuan China untuk mengungguli AS.

Contoh lainnya, dilansir dari penjelasan Derek Scissors (2011) adalah ketika masa-masa dampak dari terjadinya krisis AS di tahun 2009. Saat itu orang-orang AS dan juga media massa mempercayai bahwa China telah menduduki peringkat sebagai negara dengan perekonomian terbesar dan stabil mengacu dari data yang dikeluarkan China yang menunjukkan angka pengangguran hanya mencapai 4,5%, berbanding terbalik dengan di AS yang mencapai 9%. Padahal faktanya, tingkat pengangguran di China menurut Derek bahkan sebelum masa krisis terjadi, telah lama berada di angka 9,5% dan itu belum termasuk para pengangguran yang tidak terdata di pendesaan yang bisa mencapai 20%. Ditambah dengan fakta bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) AS di tahun 2009 mencapai kisaran 15 triliun dollar dengan rata-rata pendapatan per orang 48.000 USD, sedangkan PDB di China tidak lebih dari 5 triliun USD dengan rata-rata pendapatan per orang kurang dari 4.000 USD. Terang saja, pada saat itu China belum bisa dikatakan telah melampaui perekonomian AS.

Kegagalan demi kegagalan tersebut berangsur-angsur menjadi ambisi China lainnya untuk mengalahkan AS dalam berbagai bidang khususnya perekonomian dan politik. Namun di sisi lain, mantan Sekretaris keuangan AS Hank Paulson merujuk dari Susan Page (2015) dalam sebuah interview mengatakan bahwa menurutnya China bukanlah ancaman terbesar bagi keunggulan AS. Bahkan jika

ada yang mengatakan bahwa China sedang berproses untuk mengalahkan AS, Hank menegaskan hal itu akan sulit terjadi mengingat AS sejauh ini memiliki pengaruh politik dan ekonomi terkuat, terdalam, dan yang paling inovatif di dunia. Namun potensi kekuatan dan pengaruh China memang tidak bisa diremehkan.

Kerja sama Trilateral China-Jepang-Korea Selatan yang didambakan ketiga negara besar tersebut setelah melalui proses perundingan yang cukup lama akhirnya diresmikan pada tahun 2008 sebagai *trilateral summit* atau Konferensi Tingkat Tinggi Trilateral (KTT Trilateral) yang akan menjadi payung dalam membahas berbagai macam topik seperti diantaranya hubungan diplomatik diantara ketiganya, ekonomi regional, dan bantuan bencana. Kerja sama Trilateral ini awalnya merupakan pertemuan terpisah tiga negara Asia Timur dari *ASEAN plus Three Summit* (10+3) yang merupakan perjanjian antara negara-negara ASEAN dengan China, Jepang, dan Korea Selatan. Ketiga negara dengan perekonomian terbesar di Asia Timur tersebut tentu memiliki tujuan masing-masing untuk setuju melakukan kerjasama regional secara terpisah.

Membahas lebih dalam mengenai KKT Trilateral China-Jepang-Korea Selatan, sebelum secara official berkooperasi dalam *trilateral summit* atau dalam bahasa Indonesia berarti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Trilateral yang cakupan fungsinya luas, terlebih dahulu ketiga negara yang mendominasi perekonomian Asia tersebut berkooperasi khusus di tingkat kementerian atau lembaga di beberapa bidang yang kerja sama utama rutinnnya berputar di bidang perdagangan. Contoh diantaranya seperti Trilateral *Free Trade Agreement* (FTA) yang fokus membahas sektor perdagangan di

mana pertemuan ini telah dilaksanakan dari tahun 1999.

Jika adanya ketertarikan investasi serta membaiknya hubungan menjadi latar belakang utama internal regional antara China-Jepang-Korea Selatan, Fithra H. (2016, hal. 23) menjelaskan latar belakang utama eksternal yang mendasari munculnya Trilateral FTA adalah adanya perkembangan perdagangan bebas di wilayah barat di bawah naungan kerja sama multi negara seperti *European Union* (EU) dan *North American Free Trade Agreement* (NAFTA) dengan signifikan menjadi sebuah isu bagi China-Jepang-Korea Selatan yang masih berputar pada regulasi kerjasama yang mayoritas bilateral membawa ketiganya mengambil langkah untuk berkooperasi dalam Trilateral FTA yang mampu memaksimalkan potensi meningkatnya perekonomian regional di kawasan Asia Timur.

Adapula kerja sama khusus lain di bidang perekonomian yang diluncurkan pada Maret 2001 yaitu *Yellow Sea Rim Economic and Technological Conference* yang mekanisme kooperasi sub regionalnya melibatkan pemerintah, kelompok ekonomi, perwakilan sektor swasta atau perusahaan, universitas atau akademisi, dan lembaga penelitian dari ketiga negara. Dilansir dari laman resmi sekretariat kooperasi trilateral China-Jepang-Korea Selatan (-) latar belakang konferensi lingkaran kuning ini diajukan karena didasari kesadaran ketiga negara setelah dari KTT 10+3 di Filipina tahun 1999 dan di Singapura tahun 2000 untuk menjalin kerja sama ekonomi yang lebih rinci dalam membahas perdagangan, investasi, sains dan teknologi, industri, SDM, dan peluang bisnis pihak-pihak yang ikut di dalamnya yang bertujuan untuk pengembangan dan pendalaman blok ekonomi yang terdiri dari wilayah-

wilayah bagian China-Jepang-Korea Selatan yang berbatasan dengan laut kuning.

Kawasan perbatasan tersebut meliputi Provinsi Liaoning, Provinsi Hebei, Provinsi Shandong, Provinsi Jiangsu, Kota Beijing, Kota Tianjin, dan Kota Shanghai untuk wilayah China, Seluruh wilayah Kyushu untuk wilayah Jepang, dan Provinsi Gyeonggi, Provinsi Chungcheon Selatan, Provinsi Joella Utara, Provinsi Joella Selatan, Provinsi Gyeongsang Selatan, Kota Incheon, Kota Daejeon, Kota Gwangju, dan Kota Busan untuk wilayah Korea Selatan.

Gambar III.1 Map *Yellow Sea Rim*



Sumber: CNA.org

Selain itu terdapat *Trilateral Economic and Trade Ministers' Meeting* yang telah rutin diadakan sejak tahun 2002 untuk membicarakan dan mempelajari dampak industri tahunan dari kerja sama *Free Trade Area* (FTA) di masing-masing negara agar

dapat secara bertahap memperbarui kebijakannya, meminimalisir hambatan perdagangan, memperluas pasar intra-regional, memfasilitasi integrasi ekonomi trilateral, dan mendorong perkembangan untuk mencapai keuntungan bagi semua pihak.

Tidak lama setelah kerja sama trilateral China-Jepang-Korea Selatan yang berfokus di bidang perekonomian dan perdagangan lancar terlaksana, ide untuk memperluas cakupan dan fungsi dari kerja sama trilateral di antara ketiganya mulai dibahas dan diajukan pada tahun 2004. Dilansir dari laman berita China Xinhua (2008) hingga pada bulan Juni tahun 2008 di Tokyo, China-Jepang-Korea Selatan dengan masing-masing perwakilan menteri luar negrinya yang saat itu diwakili oleh Menteri luar negeri China Yang Jiechi, Menteri luar negeri Jepang Masahiko Komura, dan Menteri luar negeri dan perdagangan Korea Selatan Yu Myung-Hwan akhirnya bertemu dalam pertemuan trilateral dan sepakat bahwa kerja sama trilateral mereka penting untuk perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan Asia dengan adanya perluasan kerja sama logistik dan keuangan serta pertukaran sosial dan budaya dan berharap besar ketiganya dengan kondusif mampu membawa kerja sama trilateral ini menuju arah konsistensi damai, komprehensif, saling menguntungkan, serta pembangunan bersama. Dari pertemuan dan kesepakatan tersebut membawa China-Jepang-Korea Selatan dalam perjanjian trilateral yang berfungsi luas serta akan menjadi payung atas kerja sama-kerja sama ketiganya dengan adanya penandatanganan KTT trilateral tahunan pada tahun yang sama serta adanya fokus topik yang membahas perkembangan perjanjian trilateral di masa depan.

Mikael Weismann (2014) menjelaskan, China pada kisaran tahun 1990an memilih menggunakan strategi '*good neighborhood*'. Frase ini dimaksudkan

sebagai tujuan China yang ingin bangkit secara damai (*peaceful rise*) dengan menggunakan negara-negara ASEAN sebagai modelnya melalui daya pikat perekonomian China dan menghapus pemikiran di antara negara-negara Asia bahwa China merupakan ancaman. Bahkan, China akhirnya memperbesar perannya di ASEAN yang semula hanya peserta menjadi tokoh proaktif dalam lingkup multilateral. Tidak hanya itu saja, di tahun 1995 pun untuk meraih kepercayaan, China menyatakan akan mendiskusikan masalah Laut China Selatan dengan ASEAN secara terpisah. Namun sayangnya permasalahan di laut China Selatan tidak sederhana dan kembali memanas di tahun 2007 atas sikap China yang semakin agresif. Dengan hal tersebut sebagian besar legitimasi diplomasi China terhadap ASEAN hancur dalam waktu yang singkat.

Merenggangnya hubungan dengan ASEAN tentu bukanlah hal yang menguntungkan bagi China. Meskipun China dan ASEAN memiliki kerja sama *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA), dilihat dari situasi yang tegang di antara China dan negara-negara ASEAN yang berselisih di laut China Selatan tampaknya akan sulit untuk mengalahkan perekonomian Amerika Serikat. Maka dari itu China membutuhkan jalan lain yang sekaligus dapat memberikan keuntungan. Perjanjian trilateral China-Jepang-Korea Selatan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, menjadi salah satu alternatif yang paling menguntungkan pada masa krisis keuangan global. Dilansir dari website pemerintahan China (2008), ketiga menteri dari masing-masing negara sepakat bahwa kerja sama trilateral ini merupakan hal yang penting untuk menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran Asia. Tetapi di tahun 2013 kerja sama yang berjalan dengan baik ini akhirnya terpaksa

dibekukan karena berbagai isu dan perselisihan wilayah.

Beberapa contoh konflik penyebabnya utamanya ialah pertama konflik sektor maritim antara China-Jepang di mana Jonathan S. dan Kathrin H. (2013) Melaporkan hubungan China-Jepang memanas di tahun 2013 ketika PM Shinzo Abe menuduh Angkatan Laut (AL) China memprovokasi ketegangan hubungan kedua negara di tengah konflik pulau Senkaku dengan mengarahkan senjata kepada kapal perang dan helikopter Jepang di mana menteri pertahanan Jepang Itsunori Onodera juga turut menyayangkan tindakan AL China tersebut.

Di sisi Lain sebagai bentuk pembelaan sikap gegabah yang dituduhkan, China menuduh balik bahwa Jepang berupaya meningkatkan kendalinya dalam konflik Senkaku dengan membeli pulau-pulau di sekitar wilayah konflik dari pemilik individu. Jepang yang merasa tersinggung dengan sikap dan pernyataan China kemudian secara tidak langsung mendapat dukungan dari Hillary Clinton yang saat itu menjabat sebagai menteri Luar Negeri Amerika Serikat melalui pernyataannya yang menentang segala bentuk tindakan yang mengancam pemerintahan Jepang. Tentu saja dukungan Amerika Serikat terhadap Jepang ini menuai kritikan keras dari China.

Tidak hanya itu saja, dengan meningkatnya ketegangan serta semakin seriusnya serangkaian insiden sengketa maritim, China juga dengan cepat memboikot barang-barang produksi Jepang yang berisiko tinggi dapat melebarkan permasalahan ke ranah ekonomi di mana Amerika Serikat sebagai sekutu militer Jepang dapat terlibat jika tindakan China ini mengancam kondisi stabilitas Jepang. Lebih lanjut, pertemuan antara Presiden Xi Jinping dan PM Abe Shinzo yang sedang diupayakan terjadi untuk meredakan ketegangan, menurut perwakilan Jepang

yang berada di China akan sulit dilakukan dengan semakin memburuknya hubungan di antara keduanya.

Kedua, terdapat kunjungan PM Shinzo Abe ke Kuil Yasukuni di mana Michael Ivanovitch (2013) menyebutkan sikap perdana menteri Jepang, Shinzo Abe yang tetap melakukan penghormatan kepada 14 penjahat kelas atas veteran perang dunia II negaranya di kuil Yasukuni pada tahun 2013 meskipun mengetahui bahwa sikapnya akan sangat mengecewakan China dan Korea Selatan sebagai negara yang pernah merasakan penderitaan kolonial dan agresi Jepang, menjadi titik ketegangan utama lainnya yang meretakkan kerja sama trilateral China-Jepang-Korea Selatan.

Daniel S. (2013) melaporkan bahwa China dan Korea Selatan sangat mengecam tindakan perdana menteri Shinzo Abe meskipun Ia mengungkapkan kunjungan tersebut bersifat pribadi. Juru bicara kementerian luar negeri China, Qing Gang memprotes dan mengutuk tindakan perdana menteri Shinzo Abe disusul dengan Korea Selatan yang dengan tegas menyatakan bahwa penghormatan tersebut akan berdampak pada hubungan diplomatik. Hal ini didukung juga oleh pernyataan Hiroki N. (2013) yang menyebutkan bahwa Presiden Xi Jinping dan Presiden Park Geun Hye setelah dari peristiwa di kuil Yasukuni, enggan bertemu dengan perdana menteri Shinzo Abe secara pribadi.

Ketiga, Memburuknya Hubungan Bilateral Jepang-Korea Selatan di mana Kyodo (2013) melaporkan sesuai dengan pernyataan pemerintah, bahwasanya Jepang yang diwakili oleh PM Shinzo Abe dan Korea Selatan yang diwakili oleh Presiden Park Geun Hye tidak akan mengadakan pertemuan terpisah dalam agenda KTT G20 yang akan dilaksanakan pada bulan September tahun 2013 di Russia atas keengganan Presiden Park untuk bertemu

karena munculnya kembali konflik sejarah masa pemerintahan kolonial Jepang di Semenanjung Korea sebelum dan sesudah PD II yang menimbulkan sengketa pulau-pulau di laut Jepang yang dirawat oleh Korea Selatan namun diklaim oleh pihak Jepang.

Setelah sempat ditolak Presiden Park dalam ajuan pertemuan pribadi, tidak adanya permintaan PM Shinzo Abe untuk mengadakan pertemuan terpisah dalam agenda PBB pada September 2013 juga dikabarkan menjadi salah satu faktor yang merenggangkan hubungan Jepang-Korea Selatan meskipun pada bulan Juli Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida dan Yun Byung Se sempat bertemu untuk mendiskusikan hubungan bilateral kedua negara. Dari adanya permasalahan ini pemerintah Jepang memberikan pernyataan yang diwakili oleh Kepala Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga bahwasannya kedua negara tidak memiliki permasalahan mendesak yang memerlukan PM Abe-Presiden Park untuk bertemu dan Yoshihide juga menegaskan Kedua negara tetap berkomunikasi sesuai kebutuhan.

Setelah sekitar dua tahun kerja sama trilateral mendadak dibekukan, pada bulan Oktober tahun 2015 China yang diwakili oleh perwakilan perdagangan internasional Zhong Shan, Jepang yang diwakili oleh menteri perdagangan dan Industri Motoo Hayashi, dan Korea Selatan yang diwakili oleh Menteri perdagangan, industri dan energy Yoon Sang Jick kembali bertemu pada pertemuan Menteri perdagangan yang ke sepuluh. Dilansir dari website resmi kementerian perdagangan jepang *meti.go.jp* (2015), pada pertemuan tersebut para menteri membahas mengenai pemulihan kerja sama trilateral sekaligus membahas lebih lanjut mengenai keberlangsungan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) atau dalam bahasa Indonesia

dikenal sebagai kemitraan ekonomi komprehensif regional antara sepuluh negara anggota ASEAN dan enam mitra FTA yaitu China, Jepang, Korea Selatan, Australia, India, dan Selandia Baru yang sempat tertunda karena pembekuan kerja sama trilateral.

Usai dari pertemuan Menteri Perdagangan, di bulan berikutnya kerja sama trilateral kembali dilaksanakan secara resmi dengan dihadiri masing-masing kepala pemerintahan di mana Shannon Tiezzi (2015) menerangkan setelah berbulan-bulan mengantisipasi akhirnya China, Jepang, dan Korea Selatan berhasil membuat *joint declaration for peace and cooperation in Northeast Asia* yang isi pembukaannya kurang lebih pernyataan pemulihan kerja sama trilateral dengan pelaksanaan dalam basis reguler untuk terwujudnya perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan regional.

Melihat dari kondisi perekonomian China di tahun 2013 dan 2014 sebenarnya kerjasama trilateral ini, jika China merasa belum terlalu diperlukan maka bisa saja pemulihan kerja sama dapat ditunda dengan tidak mengurangi keuntungan yang di dapat China sejauh ini. Xinhua (2014) menyebutkan perekonomian China di tahun 2013 meningkat ke angka 7,7% melewati prediksi 7,5% Biro Statistik Nasional (BSN) China, di mana pada tahun 2013 juga China berhasil menciptakan 10 juta lapangan kerja baru dengan tingkat inflasi sepanjang tahun hanya berada pada kisaran 2,6%. Tidak jauh berbeda, Andrew Retallick (2015) menjelaskan di tahun 2014 pun perekonomian China meskipun melambat namun tetap tumbuh. Bahkan disesuaikan dengan metode *Purchasing Power Parity* (PPP) atau paritas daya beli, PDB China di bulan oktober tahun 2014 dapat melampaui Amerika Serikat. Walaupun dengan hasil metode PPP tidak dapat dibandingkan dengan PDB riil, China telah membuktikan pada pasar Timur dan Barat bahwa

China memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tidak menutup kemungkinan di masa depan China dapat menyusul PDB riil Amerika Serikat dengan peluang pasar yang pasti karena metode PPP juga berguna untuk menentukan tren ekonomi jangka panjang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: *“Mengapa China memutuskan untuk kembali melaksanakan kerja sama Trilateral China-Jepang-Korea Selatan di tahun 2015?”*

C. Kerangka Berpikir Konseptual

1. Model Aktor Rasional

Untuk menjelaskan latar belakang dan menjawab rumusan permasalahan di atas maka penulis akan menggunakan *Rational Actor Model* atau Model Aktor Rasional yang berfungsi untuk menjabarkan diambilnya putusan kebijakan luar negeri, sebagai berikut:

Tokoh ilmuwan politik Amerika Serikat sekaligus pencetus istilah model aktor rasional dalam pembuatan keputusan luar negeri, Graham T. Allison dalam bukunya *Essence of Decision* menyebutkan,

“These categories formalize the concept of rational action that underpins economics, decision, and game theory, as well as the less structured notion that underlies our everyday assumption of human purposiveness both in individual

behaviour and in national foreign policy. rationality refers to consistent, value maximizing choice within specified constraints. applications of this model of purposive action are considerable and instructive. the model permits decision and game theorists to structure problem of choice...” (Allison, 1971, p. 30)

Sesuai dengan kutipan di atas, Graham mencoba menjelaskan bahwa tindakan aktor rasional dalam menentukan suatu keputusan kebijakan merupakan refleksi dari perilaku keseharian individu yang menginginkan pilihan paling maksimal dan terbaik dari berbagai pilihan yang ada untuk diaplikasikan. Jadi dapat dikatakan untuk mendapatkan keuntungan dan menghindari kerugian, model aktor rasional akan selalu melakukan prediksi situasi dalam mengambil keputusan.

Merujuk dari tulisan Mohtar M. (1990, pp. 234-238) Graham T. Allison mengajukan tiga model untuk mendeskripsikan proses pembuatan keputusan politik luar negeri yaitu Model aktor rasional, Proses Organisasi, dan Politik birokratis. Lebih lanjut, Mohtar M. menjelaskan model aktor rasional dalam politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan yang sengaja dilakukan oleh aktor rasional melalui proses intelektual untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Proses intelektual yang dimaksud adalah proses yang terkoordinasi dilakukan oleh pemerintah suatu negara di mana kebijakan luar negeri yang

tengah didiskusikan telah melalui serangkaian tahapan intelektual mengenai penelaahan sungguh-sungguh dalam perhitungan alternatif untung-rugi sesuai dengan kepentingan nasional serta tujuan dari suatu bangsa.

Guru besar ilmu politik Greg C. (2014, pp. 51-52) menanggapi perihal peran model aktor rasional, dilihat dari sisi pemerintahan dunia memang kurang lebih akan condong berada di titik pengharapan pembuatan kebijakan yang masuk akal dan diperhitungkan sehingga dapat mencapai peluang terbaik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Meskipun dalam mengambil keputusan kebijakan tidak selalu menggunakan sistematika yang sama, menurutnya dalam hal ini terdapat Sembilan tahapan standar prosedural rasionalitas yang ideal, yaitu (1) *Identify and define the problem*; (2) *Identify and rank goals*, seringkali ditemukan dalam pembuatan keputusan terdapat lebih dari satu tujuan yang dapat menghambat tercapainya kepentingan yang ingin dicapai; (3) *Search for information*; (4) *Identify many alternative means/options*, dalam menentukan keputusan yang paling menguntungkan untuk mencapai suatu tujuan diperlukan pilihan-pilihan alternatif yang memungkinkan dari segala arah; (5) *Analyze each possible alternative*, bertujuan untuk membandingkan dan mencari opsi alternatif yang paling efektif untuk mencapai probabilitas hasil; (6) *Choose*; (7) *Implement*; (8) *Monitor and evaluate*, secara berkala menilai apakah hasil dari suatu kebijakan berhasil atau gagal setelah keputusan dipilih dan diimplementasikan; (9)

Terminate/alter/continue, terakhir menyikapi penilaian dari point nomor delapan.

Merujuk dari pemikiran Graham T. Allison (1971, pp. 31-32) dalam model aktor rasional, pemerintah sebagai aktor utama dalam pembuatan kebijakan harus dapat menentukan tujuan yang dapat memberikan *payoff* atau hasil tertinggi. Dalam meraih optimalisasi hasil tersebut tentunya dibutuhkan pilihan-pilihan alternatif sebagai perbandingan yang dapat dipertimbangkan melalui ilustrasi alternatif untung rugi sebagai berikut :

Tabel 1.1

Ilustrasi Alternatif Untung Rugi

Alternative A	(Cost – Benefit)
Alternative B	(Cost – Benefit)
Alternative C	(Cost – Benefit)

Sesuai dengan topik yang dibicarakan dalam skripsi ini, penulis akan menjelaskan mengenai alasan China yang menjalin kembali kerja sama trilateral dengan Jepang dan Korea Selatan pada tahun 2015 setelah tiga setengah tahun kerjas ama trilateral ini dibekukan. China secara independen merupakan salah satu negara dengan perkembangan ekonomi yang besar. Ditambah dengan inisiasi proyek jalur sutra baru China yang dapat melebarkan perekonomiannya di kawasan Asia Selatan

hingga Eropa yang dapat memberikan keuntungan lebih. Meskipun begitu, China juga tetap membutuhkan kerja sama ekonomi dengan negara di kawasannya untuk mendapatkan peluang keuntungan yang lebih lagi.

Kesempatan berkerja sama dengan Jepang dan Korea Selatan sebagai dua negara lain dengan perekonomian yang besar di kawasan Asia Timur Laut tentunya tidak bisa dilewatkan. Fan Y. (2017, p. 71) mengungkapkan bahwa kerja sama antara China-Jepang dalam bidang ekonomi merupakan hal yang pasti dan signifikan terlepas dari penurunan pasar Jepang ke China ataupun sebaliknya. Begitu pula dengan dengan kerja sama ekonomi China-Korea Selatan di mana Fan Y. (p. 69) menyebutkan bahwa kerja sama di antara keduanya merupakan kerja sama yang mulus karena tidak diliputi konflik sejarah ataupun perselisihan wilayah.

Melalui kerja sama Ekonomi bukan hal yang tidak mungkin hubungan diplomatik antara China-Jepang dan China-Korea Selatan akan terus berkembang di masa depan. Bukan tidak mungkin jika hubungan antara ketiganya sudah semakin dekat, China secara tidak langsung akan mampu mempengaruhi arah kebijakan ekonomi Jepang dan Korea Selatan untuk turut serta membuka dan mengembangkan pasar bebas Asia Timur dengan memajukan kemitraan ekonomi regional dan internasional yang tentu saja akan menguntungkan ketiga negara tersebut.

Namun, di sisi lain aliansi Jepang dan Korea Selatan dengan Amerika Serikat

bukanlah hal yang dapat disepelekan. bisa saja apa yang diharapkan China menjadi permasalahan untuk kedepannya mengingat China memiliki ambisi untuk menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia mengalahkan Amerika Serikat. Jika Jepang dan Korea Selatan mengetahui ambisi tersebut, dapat dipastikan hubungan akan merenggang dan China bisa jadi bukan mendapatkan keuntungan namun kerugian.

Dengan model aktor rasional, China dapat memutuskan untuk memilih alternatif-alternatif yang dapat membawa keuntungan maksimal hingga mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kebijakan terbaik yang dapat diambil dalam kasus ini, China dapat memilih antara Kembali melaksanakan kerja sama trilateral China-Jepang-Korea Selatan meskipun kedua negara tersebut tetap beraliansi dan berada di bawah pengawasan Amerika Serikat atau tidak melaksanakan kembali kerja sama trilateral China-Jepang-Korea Selatan dan kesempatan untuk mengembangkan perekonomian China di pasar bebas Asia Timur menurun. Dalam memilih antara kedua alternatif tersebut tentu saja terdapat kalkulasi dan analisis untung rugi yang sudah diperhitungkan, sebagai berikut :

Tabel 1.2 Aplikasi dari Ilustrasi Alternatif Untung Rugi dari Semua Alternatif

Ops	Keuntungan	Kerugian
Kerja sama Trilater	<ul style="list-style-type: none"> ○ Membuka Pasar bebas Asia Timur 	<ul style="list-style-type: none"> ○ China terikat kebijakan

<p>al China- Jepang- Korea Selatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Memajukan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional ○ melancarkan inisiasi <i>new silk road</i> atau <i>Belt Road Initiative</i> (BRI) ○ Terealisasinya keuntungan dua arah ○ Mendekatkan hubungan luar negeri China-Jepang-Korea selatan 	<p>dengan Jepang dan Korea Selatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Amerika akan terus mengawasi perjanjian trilateral tersebut sebagai aliansi dari Jepang dan Korea Selatan
<p>Tidak Kerja sama Trilater al China- Jepang- Korea selatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mendapatkan keuntungan independen ○ Dapat dengan bebas mengejar ambisi menjadi negara dengan ekonomi terbesar 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Menutup peluang pasar bebas asia timur ○ Rentan menjadi negara yang ‘mengancam’ ○ Sulit menjalankan ambisinya dalam BRI

Berdasarkan kedua alternatif dalam tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa melakukan kerja sama trilateral China-Jepang-Korea Selatan mendatangkan lebih banyak keuntungan bagi China dibandingkan dengan menolak untuk mengusung kembali kerja sama trilateral tersebut meskipun dengan begitu China secara tidak langsung akan tetap dibayangi oleh pengawasan Amerika Serikat. Dengan diperlakukannya kerja sama trilateral China-Jepang-Korea Selatan ini maka dapat membantu China selangkah lebih dekat untuk membuka pasar bebas Asia Timur yang jika berhasil maka juga akan turut membantu inisiasi jalur sutra baru karena dalam hal ini China akan menjadi negara yang menyambungkan negara-negara di Asia timur dengan negara-negara di kawasan sebelah barat.

2. Konsep *China Rising*

Untuk memperkuat pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis akan menggunakan konsep *China Rising* yang dapat berfungsi sebagai abstraksi dan pemaparan dari fenomena bangkitnya perekonomian China dan strateginya menguasai dunia, sebagai berikut :

“But what does it mean for China to become the world’s leading nation? First, it means that China’s economy will lead the world. On that basis, it will make China the strongest country in the world. As China rises to the status of a great power in the 21st century, its aim is nothing less than the top—to be the leader of the

modern global economy.” (Mingfu, 2015, hal. 2, ch.1)

Sesuai dengan kutipan di atas, dengan jelas dan spesifik Liu menyebutkan bahwa ambisi kebangkitan China adalah menjadi yang teratas dalam global ekonomi modern yang otomatis akan membuat China menjadi negara terkuat. Namun seorang analis senior yang membahas mengenai perkembangan ekonomi di Eropa dan Asia Jan Willem Blankert (2009, hal. 1) mengungkapkan bahwa kebangkitan China (*China's rise*) menurutnya merupakan fenomena yang tidak baru dalam kebangkitan perekonomian di Asia secara general, yang mana menurut Jan fenomena ini memiliki kesan pemaparan dan *hype* yang sama dengan kondisi kebangkitan perekonomian Jepang di tahun 1980an.

Jim I. (2008) menyebutkan perekonomian Jepang di tahun 1980an mengalami kejayaan ekonomi yang meroket naik dan menduduki peringkat ke dua setelah AS pasca dari masa peperangan di mana pada saat itu kedua perekonomian negara tersebut mencapai kisaran angka 40% dari ekonomi global. Memasuki kisaran tahun 1986 – 1991 dengan kemudahan untuk meminjam kredit, perekonomian Jepang juga diperkirakan telah setara dengan PDB Perancis yang mencapai 986 miliar USD hingga secara bersamaan mampu mengalahkan daya beli di AS. Hanya saja dengan kemudahan kredit tersebut juga turut menimbulkan terjadinya gelembung ekonomi atau naiknya harga barang yang jauh dari harga asli intrinsiknya di Jepang. Salah satu contohnya adalah tumbuhnya pasar *real estate* yang terbilang sangat mahal dengan

biaya satu meter persegi mencapai 300.000 USD di kawasan elite Tokyo di mana mayoritas keluarga tertarik dan setuju mengambil kredit multigenerasi untuk memiliki properti di kawasan tersebut.

Selain itu Keith B. (2004) juga melaporkan pada kisaran tahun 1980an keberhasilan perekonomian Jepang yang mencapai puncaknya dengan dibangunnya bandara Kansai di Osaka, menjadi gerbang awal perputaran perdagangan internasional pertama di kawasan Jepang barat yang sanggup menaikkan pemasukan Jepang pada saat itu. Tetapi keberhasilan perekonomian Jepang yang terus naik dan berpotensi menjadi negara dengan perekonomian terbesar nyatanya memicu terjadinya perang dagang dengan AS.

Jan W. (2009, hal. 1-3) berpendapat bahwasanya kebangkitan China termasuk dalam kebangkitan yang lambat jika dibandingkan dengan progress ekonomi negara dengan perekonomian besar lainnya. Jepang yang telah memiliki '*key to growth*' dan menuju modernisasi sejak dari abad 19, baru terjadi di China pada kisaran tahun 1970an setelah pemimpin China, Deng Xiaoping melakukan perjalanan ke beberapa negara dan kemudian menerapkan apa yang telah Deng pelajari untuk meningkatkan perekonomian China.

Melihat dari Alur kebangkitan yang baru beberapa tahun terjadi di China, Jan menyebutkan (1) bahwa kebangkitan China tidak ada bedanya dengan kebangkitan perekonomian negara lainnya yang telah dimulai lebih lama; (2) Meskipun kebangkitan

China terlihat kuat dan terus berimprovisasi setiap tahunnya, China masih merupakan negara miskin dengan lebih dari seratus juta kemiskinan dari dalam dilihat dari persentase standar kehidupan di China hanya mencapai kisaran 20% standar kehidupan di Barat; (3) *Hype* kebangkitan perekonomian China sebenarnya terjadi karena populasi besar China yang menjadikan kebangkitan perekonomian tersebut terlihat megah; (4) Populasi besar yang terus meningkat di China akhirnya juga akan berdampak pada lingkungan hidup dan tekanan kelangkaan sumber daya.

Adapun ilmuwan politik, Edward L. (2012, hal. 38) menjelaskan konsep *China rising* ada karena terprovokasi adanya krisis keuangan dunia pada tahun 2008, yang mana pada waktu bersamaan China tengah berada dalam pertumbuhan yang pesat dalam beberapa bidang yaitu kapasitas ekonomi, militer, dan pengaruhnya dalam politik diplomasi yang tentunya menjadi kesempatan emas untuk dapat naik daun dengan meyakinkan mata dunia tentang masa depan China. Jinzy Z. (2014, hal. 1) juga menambahkan bahwa pidato presiden Xi Jinping pada tahun 2012 dengan semboyan *China Dream* yang berarti seluruh cita-cita warga negara China berhasil meningkatkan keinginan, motivasi, dan ambisi China untuk kembali menjadi negara kaya raya, kuat, dan berpengaruh seperti pada masa kekaisaran China terdahulu yang berhasil membangun infrastruktur kota dengan sukses dan menjalin hubungan dagang dengan banyak negara

hingga Eropa melalui jalur darat atau lebih dikenal sebagai jalur sutra kuno.

Edward L. (2012, hal. 38) juga menjelaskan meskipun pertumbuhan China dalam banyak bidang terbilang positif, pertumbuhan China dalam bidang militer sebenarnya menjadi ancaman untuk masa depan China sendiri, karena pada dasarnya kekuatan militer tersebut dapat membawa dampak negatif yang bersifat mengancam negara lain. Tetapi sesuai dengan penjelasan Liu M. (2015, hal. 1-4, ch.7) walaupun China sendiri tahu bahwa kebangkitan China yang diiringi dengan kekuatan militer memberikan kesan ancaman kepada negara lain, alasan China tetap konsisten melakukan perkembangan dan pembaruan militernya dalam *China rising* adalah sebagai pertahanan diri untuk mencegah terjadinya perang antara AS dan China yang mana secara tidak langsung melihat dari perspektif China, kekuatan militer merupakan investasi dini yang China butuhkan untuk menangkal serangan ke dalam.

D. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan kerangka berpikir yang telah dipaparkan di atas, maka penulis menarik hipotesis kepentingan China dalam pemulihan kerja sama trilateral China-Jepang-Korea Selatan tahun 2015 karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih, sebagai berikut :

1. Membuka pasar bebas Asia Timur dan mendapatkan peluang besar dalam menjalankan ambisi ekonomi melalui jalur sutra baru dalam *Belt Road Initiative* (BRI) di

mana China akan menjadi negara penyambung yang mengalirkan barang dari dua arah yang dengan kata lain keuntungan ganda

2. Kesempatan untuk mendekatkan hubungan dan memajukan kemitraan regional China-Jepang-Korea Selatan dalam rangka melancarkan ambisi politik China

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui alasan rasional China kembali memutuskan untuk melanjutkan hubungan kerja sama trilateral China-Jepang-Korea Selatan di tahun 2015
2. Menjelaskan alasan rasional China kembali memutuskan untuk melanjutkan hubungan kerja sama trilateral China-Jepang-Korea Selatan di tahun 2015

F. Jangkauan Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, agar penulisan tidak terlalu melebar dan keluar dari topik, maka penulis membatasi penulisan mengenai motif China dalam kerja sama trilateral China-Jepang-Korea Selatan mulai dari tahun 2015 di mana ketiga negara tersebut untuk pertama kalinya bertemu kembali dalam agenda kerja sama trilateral China-Jepang-Korea Selatan setelah dua tahun berhenti. Namun penulis juga akan tetap menambahkan data-data yang sekiranya berhubungan dan memiliki sangkut paut dengan topik yang dibahas sebelum atau setelah pertemuan perjanjian trilateral China-Jepang-Korea Selatan pada tahun 2015 terjadi.

G. Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode studi pustaka yang memanfaatkan data-data yang bersumber dari buku, jurnal, dokumen, surat kabar, serta data penting terkait studi kasus lainnya oleh ahli dalam bentuk digital dari Internet

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Berisi tentang garis besar penelitian meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesa, tujuan penulisan, jangkauan penulisan, metode pengumpulan dan analisis data, dan sistematika penulisan

BAB II : Pada bab ini akan membahas mengenai arah ekonomi China dan kilas balik sejarah hubungan China-Jepang-Korea Selatan

BAB III : Pada bab ini akan membahas kerja sama trilateral China-Jepang-Korea Selatan secara umum

BAB IV : Membahas motif China melaksanakan kembali kerja sama trilateral China-Jepang-Korea Selatan 2015

BAB V : Berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya